**SISTEM PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 (INSTANSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan**

**Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi keuangan**

**Oleh :**

**Sintia Polomulo**

**NIM : 14 042 071**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**TAHUN 2018**

**DAFTAR ISI**

HAL

HALAMAN PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

PERNYATAAN ORISINAL TUGAS AKHIR iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

RIWAYAT HIDUP vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang 1
  2. Batasan Masalah 3
  3. Rumusan Masalah 3
  4. Tujuan Penelitian 4

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Peran Dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Menurut UU NO 15 Tahun 2004

2.1.1. Pemeriksaan Kinerja 12

2.1.2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 13

2.1.3. Pelaksanaan Pemeriksaan 14

2.1.4 Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut. 17

2.1.5 Pengenaan Ganti Rugi Negara. 22

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah 26

2.2.2. Penyelengaraan Pemerintah Daerah 26

2.3.3. APBD Dan Pengelolaan Keuangan Daerah 27

2.3. Standar Pemeriksaan Keuangan 30

2.4. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala BPK Oleh Pemerintah Daerah. 33

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian 35

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 35

3.3. Sumber Data 35

3.4. Teknik Pengumpulan Data 36

3.5. Teknik Analisis Data 36

**BAB IV PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan 37

4.1.2 Bidang Usaha 40

4.1.3 Struktur Organisasi 40

4.1.4 Uraian Pekerjaan 41

4.2. Hasil Opini BPK Dibeberapa Daerah. 45

4.2.1 Peran Dan fungsi BPK. 46

4.2.2 Opini Badan Pemeriksa Keuangan. 47

4.2.3 Sistem Pemeriksaan BPK Pada Kab.Bolaang Mongondow . 49

4.2.4 Upaya BPK Dalam Mengatasi Instansi Yang Mendapat Disclaimer . 50

4.3. Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 55

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan 66

5.2. Rekomendasi 66

**DAFTAR PUSTAKA** 67

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan di bawahi oleh beberapa undang-undang

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berisikan tentang Pemeriksaan dan pengelolaan keuagan Negara dimana dalam UU ini dibawahi oleh beberapa pasal dalam pasal ini terdapat beberapa pemeriksaan yaitu Ketentuan Umum, Lingkup Pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, dan Pengenaan Ganti Kerugiaan Negara.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu **Financial Planning** merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.**Implementation**Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.Dan **Evaluation**Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuang tersebut.

Menurut Tugiman (2006 : 11) Fungsi Audit suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen, agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektiv.

Tanjung (2012: 12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Penyerahan LKPD merupakan pelaksanaan mandat undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 56 yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

LKPD akan diperiksa BPK untuk diberikan opini dengan menekankan pada empat aspek yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan informasi laporan keuangan, efektifitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2011 dan 2016 kabupaten bolaang mongondow mendapatkan opini disclaimer dari BPK yaitu tahun 2011 terdapat beberapa temuan terkait dengan asset tetap, kewajiban jangka pendek, persediaan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dan pada tahun 2016 BPK juga mendapatkan temuan berupa realisasi penerimaan dan belanja kapasitas tidak berdasarkan SP3B dan SP2B, Aset tetap tanah tidak dapat ditelusuri letaknya dan tidak dapat dijelaskan dasar pencatatanny, dan nilai investigasi permanen tidak menyajikan investigasi permanen pada PD Gadasera.

Dari Hasil Pemeriksaan BPK Kabupaten Bolaang Mongondow yang dari tahun 2011-2017 banyak mendapatkan opini Disclaimer dari BPK di banding dengan instansi yang lainnya.

Diharapkan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow agar Lebih Memperhatikan LKPD agar supaya tidak lagi mendapat opini Disclaimer dari BPK Harus Lebih Memperketata adanya pengawasan di Kabputen Bolaang Mongondow Agar ditahun berikutnya Kabupaten Bolaang Mongondow bisa mendapatkan hasil Opini Yang Baik Yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

**1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang ada dapat dirumusakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas Dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi utara terhadap pengelolaan keuangan Negara pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow?
3. Bagaimana Upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemeriksa keuangan Negara pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow?
   1. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui tugas dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara dalam pemeriksa pengelolaan keuangan Negara pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Untuk Mengetahui Kendal apa saja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Untuk mengetahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
   1. **Manfaat Penelitian**
7. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepada pemerintah daerah sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan untuk pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari hasil pemeriksaan BPK RI

1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat memeberikan manfaat berupa wawasan tentang tugas dan Peran seorang audit pada BPK dan tata cara laporan keuangan untuk pemerintah daerah

1. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai hubungan antara hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.